



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW DI SURAKARTA

Komang Panjita Bayu Habijana¹, Esti Aryani², Bambang Ali Kusumo³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,

Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1panjikomang29@gmail.com

NO HP. 081339351022

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi sistem tilang elektronik (ETLE) di Polresta Surakarta sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan pelayanan publik di bidang lalu lintas. Latar belakang penelitian ini berakar pada masih banyak masyarakat Surakarta yang membawa kendaraan tidak sesuai dengan tata tertib aturan yang berlaku, dimana setiap pengendara banyak melakukan pelanggaran fisik kendaraan maupun pelanggaran non fisik dan kebutuhan mendesak untuk memodernisasi metode penindakan pelanggaran lalu lintas yang selama ini dilakukan secara manual, yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan tidak efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi penggunaan tilang elektronik atau ETLE di Polresta Surakarta serta mengkaji kendala apa saja yang penegak hukum alami dalam diterapkannya sistem ETLE. Dalam implementasinya, prosedur tilang elektronik di mulai dengan petugas mencatat nomor kendaraan pelanggar, lalu mengirimkan surat ke rumah pelanggar agar pelanggar dapat membayarkan denda tersebut. Selain tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan Memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer, dan menggunakan buku, jurnal,



peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan lalu lintas sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Tilang Elektronik (ETLE) di Polresta Surakarta bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran denda tilang secara online, mengurangi penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Aplikasi E-Tilang, yang mulai diterapkan sejak tahun 2017, memungkinkan pelanggar lalu lintas untuk membayar denda melalui jaringan perbankan tanpa harus hadir di pengadilan dan penegakan hukum lalu lintas dengan sistem Elektronik Tilang (ETLE) di Polresta Surakarta menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman di antara petugas tentang prosedur penggunaan aplikasi ETLE, serta kebingungan masyarakat mengenai cara pembayaran denda tilang setelah menerima notifikasi SMS. Proses ini masih terhambat oleh penggunaan kuota internet dan handphone pribadi milik petugas karena belum adanya anggaran khusus dan sarana prasarana yang disediakan oleh dinas. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi petugas dan mengurangi efektivitas serta efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the electronic ticketing system (ETLE) at the Surakarta Police as an effort to improve law enforcement and public services in the traffic sector. The background of this research is rooted in the fact that there are still many people in Surakarta who drive vehicles that do not comply with the applicable regulations, where each driver commits many physical vehicle violations and non-physical violations and there is an urgent need to modernize the methods of prosecuting traffic violations which are currently carried out manually. , which is prone to abuse of authority and is inefficient.

This research aims to examine how the use of electronic ticketing or ETLE is implemented in the Surakarta Police and examine what obstacles law enforcers experience in implementing the ETLE system. Apart from these objectives, this research aims to fulfill the requirements for obtaining a bachelor's degree in the Legal Studies Study Program at the Faculty of Law, Slamet Riyadi University, Surakarta.

This research uses empirical juridical research. The nature of this research is descriptive. The data used are primary and secondary data, researchers use the results of interviews obtained from informants regarding the research topic as primary data, and use books, journals, laws and regulations related to traffic as secondary data. This research uses qualitative data analysis methods



The result of this research is the implementation of Electronic Ticketing (ETLE) at the Surakarta Police with the aim of simplifying the process of paying ticket fines online, reducing abuse of authority, and increasing compliance with traffic regulations. The E-Tilang application, which was implemented in 2017, allows traffic violators to pay fines through banking networks without having to appear in court and traffic law enforcement with the Electronic Ticketing (ETLE) system at the Surakarta Police faces various obstacles, including a lack of understanding in between officers regarding procedures for using the ETLE application, as well as public confusion regarding how to pay traffic fines after receiving an SMS notification. This process is still hampered by the use of internet quotas and officers' personal cellphones because there is no special budget and infrastructure provided by the department. This condition can reduce officer motivation and reduce the effectiveness and efficiency of prosecuting traffic violations.

Keywords: *Law Enforcement, Traffic Violations, Electronic Tickets*

A. PENDAHULUAN

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan masyarakat, memajukan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara.

Dalam situasi masyarakat yang sekarang sudah sangat modern dimana teknologi terus berkembang dari segala sektor terutama bidang lalu lintas menjadi perhatian yang utama karena mobilitas setiap hari masyarakat adalah di jalan raya. Lalu lintas yang efisien dan tertib adalah elemen penting dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketentraman di jalan raya. Namun, ada berbagai hal faktor seperti peningkatan jumlah kendaraan, urbanisasi, dan sifat pengemudi yang beragam telah memunculkan tantangan baru dalam menjaga ketertiban lalu lintas



khususnya di jalan raya. Dalam hal ini semua elemen wajib bertanggung jawab atas masalah yang timbul di jalan raya, karena tidak hanya dari pihak penegak hukum saja tetapi elemen masyarakat juga harus bertanggung jawab atas kenyamanan di jalan raya.

Ketidak patuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas menjadikan pandangan yang utama karena akan menyebabkan ketidak nyamanan pengguna jalan yang lain, akan menimbulkan kecelakaan, kemacetan, yang berdampak kepada kenyamanan berkendara bersama. Di sisi lain, banyaknya kendaraan yang tidak disertai dengan kesadaran akan kepatuhan tata tertib dan keselamatan berlalu lintas selama berkendara masih menjadi kendala utama di Indonesia saat ini. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaanya”

Masih banyak masyarakat Surakarta yang membawa kendaraan tidak sesuai dengan tata tertib aturan yang berlaku, dimana setiap pengendara banyak melakukan pelanggaran fisik kendaraan maupun pelanggaran non fisik. Baru-baru ini sedang ramai diberitakan terkait terobosan terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum yakni peluncuran program tilang elektronik atau yang dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 12 (dua belas) POLDA dan nantinya akan menyusul hingga keseluruhan wilayah Indonesia pada setiap tingkat Polres. ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban, ETLE juga di definisikan sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa Automatic Number Plate Recognition (ANPR), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan, pada prinsipnya dalam penerapan ETLE terjadi perubahan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. ETLE sendiri merupakan proses penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan bantuan peralatan elektronik yang bisa men-capture/ menangkap gambar atau video pelanggaran dan nantinya menjadi dasar penerbitan surat tilang.

Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin



berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Rekaman CCTV adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut, sehingga dapat terlihat bahwa alat ini tidak sama seperti televisi biasa yang memanfaatkan broadcast signal, tetapi menggunakan sinyal tertutup.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Penulis menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif yaitu memberikan data yang sedetail mungkin sebagai bahan dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan sitem E-Tilang yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan dan hasil yang mengarah.

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang utama atau data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari Iptu Suharto SH sebagai Kanit Gakum Satlantas Poklresta Surakarta dan Kompol Agung Yudiawan, SH.SIK sebagai Kasatlantas Polresta Surakarta mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 April 2024, di POLRESTA SURAKARTA. Data sekunder adalah data pendukung atau data yang menjelaskan data primer, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Penegakan Hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Trafic Law di Surakarta berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Tilang Elektronik atau ETLE di Polresta Surakarta

Implementasi Tilang Elektronik (ETLE) di Polresta Surakarta merupakan sebuah langkah signifikan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang lalu lintas dan penegakan hukum. E-Tilang adalah sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk mempermudah proses pembayaran denda tilang secara online, sehingga masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan pembayaran secara manual. Implementasi ini didasarkan pada beberapa dasar hukum, termasuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran, serta Program Prioritas Kapolri tentang peningkatan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.

Aplikasi ETLE mulai diterapkan di Polresta Surakarta sejak tahun 2017 dan bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran denda, mengurangi penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Proses pengisian data pelanggar dalam aplikasi ini melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh petugas, seperti login dengan ID dan password, memilih opsi "Buat Tilang", memasukkan data pelanggar dan pasal pelanggaran, serta mengirimkan kode BRIVA yang digunakan untuk pembayaran denda tilang di Bank BRI. Implementasi ini tidak hanya mempermudah proses administratif tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Surakarta, Bapak Agung Yudiawan, dan Kanit Gakkum, Bapak Suharto, dijelaskan bahwa ETLE ini sangat membantu petugas dalam melaksanakan tugasnya.



Aplikasi ini dirancang untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli yang sering terjadi di lapangan. Selain itu, dengan adanya ETLE, pelanggar tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan, yang dinilai sangat membantu terutama bagi masyarakat Solo dan pengunjung dari luar kota. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti pekerjaan ganda bagi petugas yang harus menulis data pelanggar secara manual terlebih dahulu sebelum menginputnya ke aplikasi ETLE. Hal ini menyebabkan proses penindakan tilang membutuhkan waktu yang lebih lama.

Mekanisme kerja ETLE di Polresta Surakarta melibatkan beberapa tahap. Pertama, polisi melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan mencatat data pelanggar di aplikasi ETLE. Data ini mencakup nomor ponsel pelanggar yang kemudian digunakan untuk mengirimkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS yang berisi nomor BRIVA dan nominal denda yang harus dibayarkan. Pelanggar kemudian melakukan pembayaran denda melalui jaringan perbankan. Setelah pembayaran selesai, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran. Proses persidangan untuk menentukan nominal denda tilang dilakukan tanpa kehadiran pelanggar, dan hasil putusan disampaikan kepada pelanggar melalui notifikasi SMS. Sisa dana titipan denda tilang, jika ada, dapat diambil di unit kerja BRI di seluruh Indonesia.

2. Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dengan Badan Narkotika Nasional dalam Proses Asesmen

Ko Penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan sistem Elektronik Tilang (ETLE) di Polresta Surakarta menghadapi beberapa kendala. Selama ini, metode konvensional yang lambat, birokrasi yang berbelit, dan praktek pungli yang marak menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Polantas. Sebagai jawaban terhadap tantangan ini, Korlantas Polri meluncurkan program ETLE, sebuah inovasi untuk memperbaiki penegakan hukum di bidang lalu lintas. Aplikasi ETLE dirancang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi penyalahgunaan wewenang, dan memudahkan proses pembayaran denda tilang. Namun, agar implementasi berjalan efektif, diperlukan personel yang memiliki pengetahuan dan kualitas yang baik dalam menggunakan aplikasi ini.



Dalam analisis penulis menggunakan Teori Manajemen dari George Robert Terry, ada beberapa unsur manajemen yang perlu diperhatikan dalam implementasi ETLE. Pertama, faktor manusia. Meskipun seluruh anggota Satlantas Polresta Surakarta telah mengikuti pelatihan penindakan pelanggaran lalu lintas, tidak semuanya memahami prosedur dan mekanisme penggunaan ETLE. Hal ini dapat menghambat efektivitas program ETLE. Menurut wawancara dengan Kanit Gakkum Polresta Surakarta, banyak anggota yang belum mengerti sepenuhnya tentang prosedur ETLE. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut kepada petugas Satlantas.

Selain itu, masyarakat juga kurang mengerti tentang program ETLE dan metode pembayarannya. Berdasarkan wawancara dengan pelanggar lalu lintas, banyak yang bingung tentang proses pembayaran setelah menerima notifikasi SMS dari ETLE. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat diperlukan agar mereka memahami prosedur ETLE dan tidak kebingungan saat harus membayar denda tilang.

Kendala kedua adalah terkait dengan uang. Pelaksanaan penilangan dengan ETLE di Polresta Surakarta masih menggunakan kuota internet pribadi milik petugas, karena belum ada anggaran dari dinas untuk membiayai kuota internet. Hal ini dapat menurunkan motivasi anggota dan menghambat penegakan hukum. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengajukan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mendukung pelaksanaan ETLE, serta memberikan honor kepada operator aplikasi ETLE untuk meningkatkan motivasi kerja.

Ketiga, materials atau bahan-bahan yang digunakan. Saat ini, pelaksanaan penindakan dengan ETLE masih menggunakan handphone pribadi milik petugas, karena belum ada handphone khusus yang disediakan oleh dinas. Menurut wawancara dengan Kanit Gakkum Polresta Surakarta, meskipun pelaksanaan ETLE berjalan dengan baik, penggunaan handphone pribadi dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk handphone khusus yang dilengkapi dengan aplikasi ETLE, agar pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



D. KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan sistem tilang elektronik (ETLE) terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dengan deteksi pelanggaran menggunakan kamera ETLE yang dipasang di titik strategis untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran. Data pelanggaran yang direkam kemudian dianalisis dan diverifikasi oleh petugas lalu lintas. Setelah verifikasi, sistem ETLE secara otomatis membuat dan mengirim surat tilang berisi rincian pelanggaran dan instruksi pembayaran kepada pemilik kendaraan melalui pos atau metode lain. Pelanggar juga menerima notifikasi SMS yang berisi informasi pembayaran denda, yang dapat dilakukan melalui berbagai metode perbankan. Setelah pembayaran denda terkonfirmasi, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita di kantor polisi. Sistem ETLE ini mempermudah proses tilang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengikuti sidang di pengadilan, sehingga lebih efisien dan praktis bagi masyarakat.
2. Penegakan hukum lalu lintas dengan sistem Elektronik Tilang (ETLE) di Polresta Surakarta menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman di antara petugas tentang prosedur penggunaan aplikasi ETLE, serta kebingungan masyarakat mengenai cara pembayaran denda tilang setelah menerima notifikasi SMS. Proses ini masih terhambat oleh penggunaan kuota internet dan handphone pribadi milik petugas karena belum adanya anggaran khusus dan sarana prasarana yang disediakan oleh dinas. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi petugas dan mengurangi efektivitas serta efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan yang lebih mendalam bagi petugas Satlantas mengenai prosedur ETLE, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang program ETLE dan metode pembayarannya. Selain itu, penting untuk mengajukan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mendukung pelaksanaan ETLE dan memberikan honor kepada operator aplikasi ETLE. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk handphone khusus yang dilengkapi dengan aplikasi ETLE, juga sangat diperlukan agar pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polantas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Barda Nawawi Arif. (2002). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif, dkk. (2002) 23
- Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardiman. (2004), Menuju Tertib Lalu Lintas. Jakarta: Gandesa Puramas,
- Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Jakarta : Balai Pustaka.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Transformasi Dan Kesiapan Polri Untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan Dan Peluang Era Revolusi Industri, Paparan Kakorlantas Polri, 2019, hlm. 24

Jurnal :

- Bambang Ali Kusumo. (2010). Problematika Penegakan Hukum Pidana dan Upaya Mengatasinya. Vol 9(2). Wacana Hukum.
- Budhiastuti SR & Esti Aryani. (2022). Faktor Yang Menyebabkan Terdakwa Melakukan Kekerasan Seksual. Vol 18(1)
- Sona Seki Halawa. (2015). Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. 1(1)



Junef Muhar. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. E-Journal Widya Yustisia. 52 (1)

Jhoni Eka, dkk. 2023. Evaluasi Sistem Penalti Pembayaran Denda Tilang Guna Menciptakan Kepatuhan Berlalu Lintas. Vol 3 (6). Journal of Social Science Research.

Setiyanto. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah. 12(4)

Peraturan – Peraturan

Peraturan.bpk.go.id

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Internet

<https://kompas.com/tren/read/2022/11/11/170000756/pelanggaran-apa-saja-yang-kena-e-tilang>.diakses.12 desember 2023.

Korlantas Polri. E-TLE Nasional Bakal Diberlakukan, Ini 10 Jenis Pelanggaran Yang Terekam [diakses pada 30 Maret 2024].